

**2022**



# **LAPORAN KINERJA**

**DINAS PERHUBUNGAN**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, 1 Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ASBAN ARIS, MH

NIP. 19660224 199412 1 003

# Ikhtisar Eksekutif

---

Capaian kinerja PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 85; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 75,09. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 88,34%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 66,67 terjadi peningkatan sebesar 8,42.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 87,37%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 75,09%. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 85,95%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 72,58% terjadi penurunan sebesar 2,51%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun}} \times 100\%$

b. Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$\frac{\text{Jumlah Rute Pelayaran yang terfasilitasi terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah Rute Pelayaran yang terfasilitasi selama 5 tahun}} \times 100\%$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Pengelolaan Pelayaran
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 81,5%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 50%. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 61,35%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 58,33% terjadi penurunan sebesar 8,33%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
2. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

---

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur	10
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	10
1.3 Isu-isu Strategis	10
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	28
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022	29
3.3. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	40

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	11
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022	17
Tabel II.1 Sasaran Strategis PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	21
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	25
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Tahun 2022	26
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	29
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran	30
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	33
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	36

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
Gambar II.1. Sistem Integrasi DPA, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 20	
Gambar II.2. Website PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
Gambar II.3. Layanan Pengaduan Melalui Website PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

*Cascading Kinerja  
Mandat Kinerja,  
Peta Proses Bisnis dan  
Struktur Organisasi  
Tugas, Fungsi dan  
Peta Jabatan  
Isu-Isu Strategis  
Dukungan SDM,  
Sarana- Prasarana  
dan Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

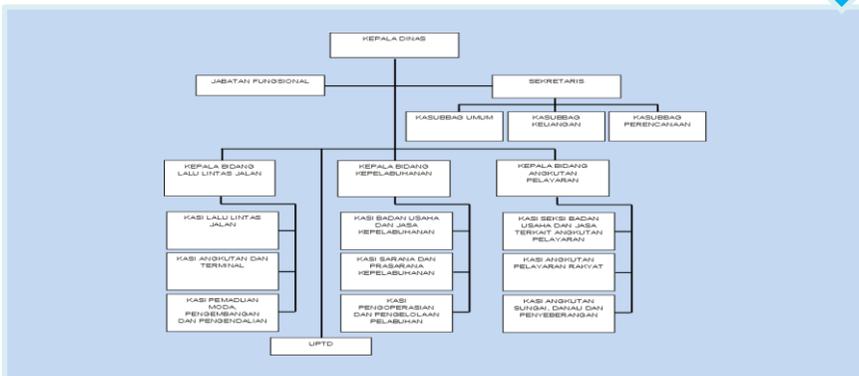
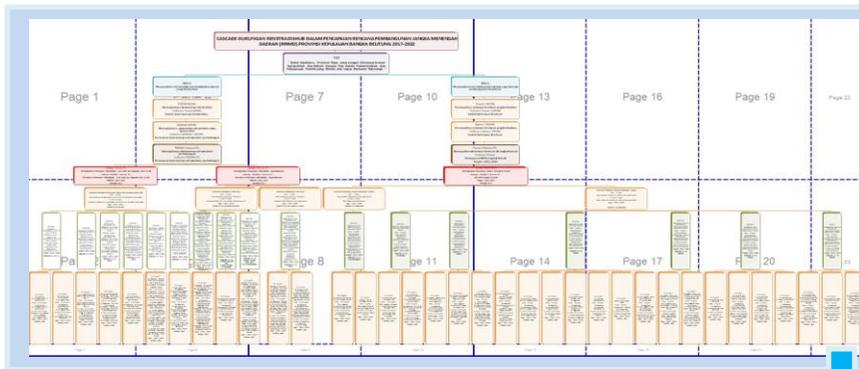
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



## 1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Dinas Perhubungan**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang non Pelayanan Dasar. Adapun PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<b>Jabatan Struktural :</b> Esselon II : 1 Esselon III : 4 Esselon IV : 9 <b>Jabatan Fungsional :</b> Jabatan Fungsional Tertentu : 6	<b>Jabatan Pelaksana : 46</b>

## 1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi PD Dinas

Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penggunaan teknologi informasi untuk pengidentifikasian capaian dan progres kinerja;
2. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan dan kecelakaan pada ruas jalan pusat-pusat ekonomi;
3. Jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan oleh masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan serta pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan;
4. Belum optimalnya pembangunan konektivitas sektor perhubungan di pulau-pulau berpenduduk sehingga belum mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

#### 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1/D4	D3		S3	S2	S1/D4	D3		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>												
1	KEPALA DINAS	1			1		1					1	
2	SEKRETARIS	1			1		1					1	
3	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1			1				1			1	
4	KEPALA BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN	1					1		1			1	
5	KEPALA BIDANG KEPSELABUHANAN	1			1		1			1		1	
6	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1			1		1			1			1
7	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1					1		1			1	
8	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1					1		1				1
9	KEPALA SEKSI LALU	1			1		1			1		1	

	LINTAS JALAN												
10	KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA, PENGAMBANGAN DAN PENGENDALIAN	1		1		1			1		1		
11	KEPALA SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT	1		1		1		1			1		
12	KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1		1		1			1		1		
13	KEPALA SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN	1		1		1		1			1		
14	KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN	1		1		1			1				1
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>												
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	3		3		3			3		3		
2	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	1		1		1			1		1		
3	PENGELOLA BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	1		1		0							
4	ARSIPARIS TERAMPIL	1		1		0							
5	ANALISA KEPEGAWAIAN PERTAMA	1		1		0							
6	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1		1		0							
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>												
1	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	1		1		1			1		1		
2	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	1		1		0							
3	PENGADMINISTRASI UMUM	1			1	1				1	1		
4	PENATA LAPORAN KEUANGAN	3		3		3			3				3
5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	1		1		0							
6	BENDAHARA	1		1		0							
7	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	3		3		3			3		2		1
8	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1		1		0							
9	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	1		1		0							

10	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT	3			3			3			3	
11	ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1			1			1			1	
12	PENGAWAS TRANSPORTASI	1			1			1			1	
13	PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	2				2					2	2
14	PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	3				3		2				2
15	ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT	3				3					3	1
16	ANALIS LALU LINTAS	2				2					2	2
17	ANALIS RENCANA UMUM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT	1				1					1	
18	PENGAWAS KESELAMATAN DARAT	1				1					1	1
19	PEMERIKSA LALU LINTAS DARAT	2				2					2	2
20	PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT	1				1					1	1
21	TEKNISI SURVEY JARINGAN TRANSPORTASI	1					1	1				1
22	PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARAN JALAN	1					1	1				1
23	PENGELOLA PENGAWASAN LLAJ	2					2	2				2
24	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2					2	2				2
25	PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	1					1	1				1
26	ANALIS ANGKUTAN DARAT	1					1	1				1
27	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	2					2	2				2
28	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	1					1	1				1
29	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	1					1	0				
30	PENGAWAS PELABUHAN	2					2	2				2
31	ANALIS PERIZINAN TRANSPORTASI	2					2	2				2
32	PENGELOLA PERIZINAN	2					2	2				2
33	ANALIS PELABUHAN	3					3	3				3
34	PENGELOLA DATA	1					1	1				1

35	PEMERIKSA PELABUHAN	1			1		1			1		1	
36	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	1				1	0						
37	PENYUSUN KINERJA JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	3			3		3			3		3	
38	PENGELOLA LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1				1	0						
39	PENGADMINISTRASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1				1	1				1	1	
40	ANALIS PELAYARAN	2			2		1			1		1	
41	PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEMANAAN KAPAL SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1				1	1				1	1	
42	PENYUSUN TEKNIS IJIN OPERASI PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1			1		0						
43	PRAMU BAKTI	3				3	3				3		3
44	PRAMU KEBERSIHAN	6				6	6				6	5	1
45	PETUGAS KEAMANAN	4				4	4				3	3	
46	PENGEMUDI	4				4	4				4	4	
JUMLAH		105	0	0	64	38	90	0	7	49	17	56	17

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan belum merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 50 orang (56%), disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 16 orang (18%) dan SLTA sebanyak 16 orang (18%) ,S2 sebanyak 7 orang (8%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak laki-laki. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>4</b>	<b>Rp 203.522.396,00</b>
	TANAH	4	Rp 203.522.396,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>9192</b>	<b>Rp39.593.535.215,88</b>
	ALAT BESAR	8	Rp 1.335.491.500,00
	ALAT ANGKUTAN	19	Rp 2.809.383.750,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	44	Rp 490.626.400,00
	ALAT PERTANIAN	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	530	Rp 2.541.693.038,94
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	59	Rp 422.818.789,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	3	Rp 3.593.461.990,00
	ALAT LABORATORIUM	8	Rp 31.985.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	85	Rp 69.387.000,00
	KOMPUTER	126	Rp 648.655.000,00
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0

	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU – RAMBU	8310	Rp 27.650.032.747,94
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>344</b>	<b>Rp42.085.799.500,28</b>
	BANGUNAN GEDUNG	316	Rp 37.693.828.300,28
	MONUMEN	16	Rp 157.791.000,00
	BANGUNAN MENARA	11	Rp 3.908.842.000,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	Rp 325.338.200,00
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>469</b>	<b>Rp82.609.486.846,98</b>
	JALAN DAN JEMBATAN	460	Rp 79.969.652.053,98
	BANGUNAN AIR	4	Rp 1.608.643.000,00
	INSTALASI	4	Rp 1.016.266.793,00
	JARINGAN	1	Rp 14.925.000,00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>522</b>	<b>Rp3.286.373.500,00</b>
	BAHAN PERPUSTAKAAN	516	Rp 1.222.137.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA	1	Rp 6.327.500,00
	HEWAN	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5	Rp 2.057.909.000,00
<b>6</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>6</b>	<b>Rp 516.524.036,00</b>
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6	Rp 516.524.036,00
<b>7</b>	<b>DII.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10.153</b>	<b>Rp 168.295.241.495,14</b>

Kendaraan operasional PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 10 unit kendaraan operasional, 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet\*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain\*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana

belum memadai. Hanya saja sebanyak 20% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung\*) tuntutan pekerjaan yang 80% berbasis IT.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2021	18.315.653.249	6.273.489.410	-	-	24.589.142.650
2022	21.307.040.156	2.652.769.181	-	-	23.959.809.337

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 dibanding tahun 2022 terdapat penurunan anggaran belanja langsung sebesar Rp 629.333.313 Hal ini menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung            Nomor : 700/066/LHE/INPTD/2022            perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP PD d Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah khusus IKK Output yang belum dilaksanakan serta meningkatkan Capaian Kinerja IKK Outcome Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah</li> <li>Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan target yang</li> </ol>	<p>PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan Pencapaian Kinerja IKK Outcome Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>Mengupayakan Peningkatan Capaian Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra</li> </ol>

	telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra	
--	--	--

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :  
Tujuan,  
Sasaran dan  
Indikator Kinerja OPD  
Strategi dan  
Arah Kebijakan  
Struktur Program  
dan Kegiatan Tahun  
2022*

Renstra PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah

## 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan

Adapun sasaran PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, 2017-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	78	85	85
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	75	10,83	21,89	44,12	62,25	87,37	87,37
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan	%	-	-	-	-	67,25	81,5	81,5

### 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan, pemeliharaan Dan pembangunan sarana Prasarana perhubungan
3.	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Meningkatkan, pemeliharaan Dan pembangunan sarana Prasarana perhubungan Kepelabuhanan

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.360.529.084	12.980.575.219	- 1.379.953.865
		1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.325.723	135.899.821	- 3.425.902
		1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.018.000	78.629.893	- 1.388.107
		2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.307.723	57.269.928	- 2.037.795
		2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.115.316.072	9.244.563.835	- 870.752.237
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.115.316.072	9.244.563.835	- 870.752.237
		3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
		1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
		2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
		4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.618.007.594	1.361.689.959	- 256.317.635

	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.145.785	19.870.000	- 275.785
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	704.468.181	502.939.991	- 201.528.190
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.507.415	123.347.125	- 33.160.290
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.432.016	25.507.719	- 1.924.297
	5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	81.083.197	78.578.000	- 2.505.197
	6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	17.150.000	14.214.300	- 2.935.700
	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	611.221.000	597.232.824	- 13.988.176
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.191.258.695	1.151.882.592	- 39.376.103
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	-
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	542.858.695	517.982.592	- 24.876.103
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.900.000	626.400.000	- 14.500.000
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.296.621.000	1.086.539.012	- 210.081.988

		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.000.000	287.171.834	- 40.828.166
		2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.830.000	127.124.681	- 43.705.319
		3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	797.791.000	672.242.497	- 125.548.503
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.274.141.053	5.454.956.700	- 2.819.184.353
		1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.921.987.985	3.883.843.672	- 38.144.313
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.035.759.000	2.022.119.520	- 13.639.480
		2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.886.228.985	1.861.724.152	- 24.504.833
		2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	480.031.000	233.296.400	- 246.734.600
		1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	480.031.000	233.296.400	- 246.734.600
		3	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	439.454.608	421.075.405	- 18.379.203
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	439.454.608	421.075.405	- 18.379.203
		4	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	400.371.460	400.068.987	- 302.473

		1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	400.371.460	400.068.987	- 302.473
		5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.032.296.000	516.672.236	- 2.515.623.764
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.032.296.000	516.672.236	- 2.515.623.764
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	3	Program Pengelolaan Pelayaran	1.325.139.200	368.116.219	- 957.022.981
		1	Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan	947.404.000	12.178.180	- 935.225.820
		1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota	947.404.000	12.178.180	- 935.225.820
		2	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	238.605.000	223.435.428	- 15.169.572
		1	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	238.605.000	223.435.428	- 15.169.572

	3	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	92.216.000	85.607.425	- 6.608.575
	1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	92.216.000	85.607.425	- 6.608.575
	4	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	46.914.200	46.895.186	- 19.014
	1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	46.914.200	46.895.186	- 19.014
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>			<b>23.959.809.337</b>	<b>18.803.648.138</b>	<b>5.156.161.199</b>

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran**

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.360.529.084	12.980.575.219	- 1.379.953.865
	Total Anggaran Pendukung	14.360.529.084	12.980.575.219	- 1.379.953.865

**Tahun 2022**

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	Triwulan I	0
					Triwulan II	85
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	85
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	67,25	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	67.25
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	81,5	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	81,5

Pada tahun 2022, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2022 adalah sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	Triwulan I	0
					Triwulan II	85
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	85
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	67,25	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	67.25
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	81,5	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	81,5

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran berkurang 22 % sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

Capaian  
Kinerja Tahun  
2022

Realisasi  
Anggaran  
Inovasi  
Lintas Sektor

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022**

PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RENSTRA
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Nilai SAKIP Perangkat Daerah <u>Formula Perhitungan:</u> Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	66,67	85	75,09	88,34	Tinggi	85
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<u>Indikator:</u> Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) <u>Formula Perhitungan:</u> <u>Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n) X 100%</u> Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun	%	75	72,58	87,37	75,09	85,95	Tinggi	87,37
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	<u>Indikator:</u> Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan <u>Formula Perhitungan:</u> <u>Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n) X 100%</u> Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama	%	-	58,33	81,5	50	61,35	Rendah	81,5

		5 tahun								
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun}} \times 100\%$
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun}} \times 100\%$

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan  $\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun}} \times 100\%$  Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 75,09% atau sebesar 87,37% dari target 85,95%. dan Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan  $\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun}} \times 100\%$

Kepelabuhanan terbangun (tahun n) Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun dikalikan 100 persen. Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 50% atau sebesar 81,5% dari target 58,33%. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	72,58	87,37	75,09	85,95	87,37	85,94
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	58,33	81,5	50	61,35	81,5	61,34

- Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
  - a. Tercapai 75,09% dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 85,95 % belum melampaui.
  - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 85,95 % , terhadap target tahun lalu sebesar 72,58 (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan sebesar 13,37%
  - c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut

:

Sasaran dari program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan Indikator *Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan*

*Angkutan Jalan (LLAJ)*. formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n) X 100%\_Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun Pada tahun 2022 diselenggarakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(75,09/87,37) \times 100\% = 85,95\%$  dari target 87,37 atau sebesar 1,42%.

- Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan adalah sebagai berikut:
  - a. Tercapai 50 % , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 61,31% belum melampaui.
  - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 61,35 % , terhadap target tahun lalu sebesar 58,33% (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan sebesar 3,02%
  - c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut

:

Sasaran dari program Program Pengelolaan Pelayaran yaitu Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan dengan Indikator *Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan*. formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n) X 100%\_\_\_\_\_ Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun Pada tahun 2022 diselenggarakan oleh Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran .

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(50/81,5) \times 100\% = 6,13\%$  dari target 81,5% atau sebesar 75,37%.

**Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<i>Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	87,37%	75,09%	85,95%
2	<i>Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan</i>	81,5%	50%	61,35%

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p style="text-align: center;">Survei Kepuasan Layanan Transportasi Tahun Anggaran 2022</p>
2.		<p style="text-align: center;">Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>
3		<p style="text-align: center;">Pemasangan Perlengkapan Jalan (Marka Jalan)</p>

**Faktor Pendukung keberhasilan**

- a. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.
- b. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Adanya hibah 2 Unit Dermaga Pelabuhan Rakyat (Dermaga Pulau Selu dan Dermaga Pulau Minadanau) dari Pemerintah Kabupaten Belitung.
- d. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

**Faktor Penghambat keberhasilan**

- a. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
- b. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
- c. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

### 1.1 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	87,37 %	75,09%	85,95%	Rp 8.274.141.053	Rp 5.221.660.300	63,11%	Rp 3.052.480.753
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	81,5%	50%	61,35%	Rp 1.325.139.200	Rp 368.116.219	27,78%	Rp 957.022.981
Jumlah									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	-	-	Rp 14.360.529.084	Rp 12.980.575.219	90,39%	Rp 1.379.953.865
		Survey Kepuasan Internal	-	-	-				
Total Belanja Langsung						Rp 23.959.809.337	Rp 18.5780.351.738	77,51%	Rp 5.389.457.599

**Sumber:** *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Dinas Perhubungan .Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2022, Laporan Keuangan PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 23.959.809.337, terealisasi Rp 18.5780.351.738 atau 77,51% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 5.389.457.599% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman

## **1.2 Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Sistem Informasi Asset Dinas Perhubungan Berbasis Spasial, untuk Memudahkan Pengalokasian Pengadaan dan Pemeliharaan Asset Dinas Perhubungan

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

*Kesimpulan*

*Rekomendasi*

*Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
2. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.
2. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
3. Adanya hibah 2 Unit Dermaga Pelabuhan Rakyat (Dermaga Pulau Seliu dan Dermaga Pulau Minadanau) dari Pemerintah Kabupaten Belitung.
4. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan mekanisme pendanaan melalui Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Perhubungan.
2. mendorong terbentuknya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Adanya komitmen bersama dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian terhadap percepatan pembangunan pelabuhan ,
4. Menyusun skala prioritas pembangunan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)*

#### **Tujuan dan Sasaran PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10,83	21,89	44,12	62,25	87,37
		Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	0	0	0	67,25	81,5

2	Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	0	0	0	78	85
---	---	--	---------------------------	---	---	---	----	----

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASBAN ARIS ,M.H.  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN  
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

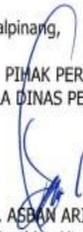
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  
Drs. ASBAN ARIS, M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660224 199412 1 003

*Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021*

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Perhubungan



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021**

NOMOR : 700/144/INPTD/2022  
TANGGAL : 29 APRIL 2022



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
R. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TEL. (0757) 800131-315 (5600)

Pangkalpinang, 29 April 2022

Por : 700/1-N /INPTD/2022

Sp. :

Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Dinas  
Perhubungan Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
di -  
PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem SAKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah;
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperoleh nilai sebesar, **75,09** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, Akuntabilitas kinerja sudah baik. Memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,81	25,52
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,51	18,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,30	9,26
d.	Evaluasi Internal	10	12,71	6,59
e.	Pencapaian Sasaran	20	26,69	15,28
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,85	75,09
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJMD 2017-2022;
- 2) Renstra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan;
- 3) Dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Indikator Kinerja individu belum seluruhnya mengacu pada IKU unit kerja dan belum dilakukan pengukuran secara berjenjang;
- 2) Pengukuran kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi;
- 3) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitoring, namun masih berupa kerja belum berupa kinerja;
- 4) Hasil pengukuran kinerja tersebut belum dimanfaatkan untuk pemberian *reward dan punishment*;
- 5) IKU belum direviu secara berkala dan pengukuran kinerja atas rencana aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

Pelaporan kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai IKU;
- 2) Laporan Kinerja belum seluruhnya menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, target akhir Renstra dan Target Nasional;
- 3) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran;
- 4) Penyajian informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan;
- 5) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

- 6) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja;
- 7) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja.

**d. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja yang perlu diperhatikan yaitu belum terdapat laporan atas hasil evaluasi rencana aksi dan evaluasi program belum tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang perlu diperhatikan yaitu capaian kinerja belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

**f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti**

- 1) Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja identifikasi secara lebih tepat dan cepat;
  - 2) Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi minimal setiap bulan dalam rangka pengendalian kinerja dengan dibuktikan oleh catatan-catatan, dokumentasi atau data pendukung lainnya dan dilaporkan pada laporan kinerja (LAKIP);
  - 3) Meningkatkan kualitas penyajian Laporan kinerja yang menggambarkan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan agar dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilal dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta dapat digunakan untuk perbaikan kinerja.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Dalam penyusunan dokumen Renstra 2023-2026 agar tujuan dan indikator sasaran berorientasi hasil dan SMART selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;
  - b. Menyajikan informasi Laporan Kinerja tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran;
  - c. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan menjadi lebih baik dari tahun ketahun;
  - d. Menyusun laporan hasil evaluasi atas rencana aksi dan program;
  - e. Menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

  
INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
*[Signature]*  
SUSANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196306121985031001

Isian:  
Rombongan PAN dan RB;  
Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung            Nomor : 700/066/LHE/INPTD/2022            perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP PD d Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>3. Melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah khusus IKK Output yang belum dilaksanakan serta meningkatkan Capaian Kinerja IKK Outcome Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah</p> <p>4. Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra</p>	<p>PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah:</p> <p>3. Mengupayakan Pencapaian Kinerja IKK Outcome Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Mengupayakan Peningkatan Capaian Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra</p>

